

EFEK DOMINO PASCA DIBANGKITKANNYA KESULTANAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA

Fadli Afriandi¹; Fachriza Ariyadi²

¹Jurusan Ilmu Politik STISIPOL Candradimuka

²RSUD Aji Muhammad Parikesit

e-mail: fadli_afriandi@yahoo.com; fachriza_ariyadi@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat efek domino yang terjadi ketika rezim pemerintahan di tingkat lokal membangkitkan kembali lembaga formal yang dulu pernah hadir di daerah tersebut. Tulisan ini mengajukan tesis utama bahwa identitas dibangkitkan sebagai alat bagi penguasa dalam merebut, mempertahankan, dan menunjukkan kekuasaan. Lembaga formal yang dihidupkan kembali adalah Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibubarkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan pandangan instrumentalisme menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rezim membangkitkan kesultanan adalah untuk mendukung proses elektoral dalam pemilihan kepala daerah. Namun tujuan itu tidak tercapai karena Kesultanan Kutai Kartanegara mendukung kerabat kesultanan yang juga ikut dalam proses elektoral tersebut. Dengan keadaan seperti itu terjadi pergesekan antara rezim pemerintah Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Akibatnya hajatan tahunan kesultanan (*Festival Erau*) selama tiga tahun (2004-2006) terhenti karena ketergantungan anggaran pihak kesultanan dengan pemerintah.

Kata Kunci: Anggaran; Elektoral; Erau; Identitas

Abstract: *This paper is a study of identity politics that aims to see the domino effect that occurs when government regimes at the local level revive formal institutions that were once present in the area. This paper proposes the main thesis that primordial identity is raised as a tool for rulers to seize, defend, and show power. The formal institution that was revived was the Kutai Kartanegara Sultanate, which once existed as a state institution and was dissolved due to the enactment of Emergency Law No. 3 of 1953 and Law No. 27 of 1959 concerning the formation of second-level regions in Kalimantan. This paper uses the approach of culturalism with an instrumentalist view that uses qualitative methods and data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the regime arousing the empire was to support the electoral process in regional elections. However, that goal was not achieved because the Sultanate of Kutai Kartanegara supported the Sultanate's relatives who also participated in the electoral process. Under such circumstances there was a friction between the government regime of Kutai Kartanegara and the Sultanate of Kutai Kartanegara. As a result, the annual celebration of the empire (Erau Festival) for three years (2004-2006) was stopped due to the dependence of the Sultanate's budget on the government.*

Keywords: Budget; Electoral; Erau; Identity

PENDAHULUAN

Jika melihat sejarah maka kehidupan di Indonesia tidak lepas dari keberadaan kerajaan/kesultanan di berbagai tempat. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa kerajaan yang begitu terkenal dengan keberadaan maupun kebesarannya, misal Kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Nusantara, Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar, Kerajaan Sriwijaya yang menganut Budha, Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam dan sebagainya (Brown, 2003). Kerajaan-kerajaan yang hadir sebelum Indonesia merdeka tersebut sekarang telah habis masa eksistensinya. Namun terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana sistem kerajaan masih dianut dan diakui oleh negara sebagai pemerintahan yang sah yang dikenal dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Wafi, 2019: 176). Berbeda statusnya dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, di Kabupaten Kutai Kartanegara kehadiran kesultanan juga diupayakan kembali eksis di tengah kehidupan bermasyarakat.

Tulisan ini menjadi penting dikaji karena selama ini kajian identitas didominasi oleh kajian identitas sosial berbasis ideologi, agama, gender, etnis, ras, kelas ataupun seksualitas (Jelly dkk, 2019; Heyes, 2018; Maarif, 2012). Dalam tulisan ini penulis menyajikan bagaimana identitas primordial (Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura) yang dulu dihentikan namun sekarang kembali dihidupkan. Pada tahun 1999 upaya penghidupan kembali identitas ini dimulai dan ditahun 2001 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kembali hadir dengan mengangkat seorang sultan (KutaiKartanegara.com, 2020). Penghidupan kembali identitas tersebut membuat efek domino antara pembentuk dan yang dibentuk yaitu antara rezim pemerintahan di Kutai Kartanegara dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Maka tulisan ini berusaha mengungkap *impact* (dampak) yang kemudian terjadi pasca kehadiran kembali Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terhadap rezim di Pemerintahan Kutai Kartanegara.

Berbicara tentang rezim tidak akan lepas dengan kekuasaan. Rezim yang berkuasa cenderung akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan rezimnya dengan cara apapun. Misalnya ketika era Orde Lama, Indonesia dikuasai oleh rezim Soekarno yang pada masa demokrasi terpimpin kita mengenal dengan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru-pun demikian ketika Soeharto mampu menguasai Indonesia hingga 32 tahun. Soeharto menggunakan cara dengan mekanisme legal-formal dan laten-simbolik. Beberapa manuver politik dilakukan Soeharto sampai akhirnya diruntuhkan melalui gerakan sosial di tahun 1998 (Sudibyo, 1998).

Keadaan seperti ini-pun bisa kita lihat ketika berbicara sebuah rezim di tingkat lokal. Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kabupaten dengan pendapatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2000an dipimpin oleh seorang bupati yang berdarah Banjar-Makassar, Syaukani Hasan Rais (berikutnya ditulis Syaukani). Syaukani menjadi bupati spesial karena merupakan bupati pertama setelah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun jika dihitung semenjak keberadaan Daerah Istimewa Kutai, maka Syaukani adalah bupati yang ke sembilan. Syaukani merupakan Bupati Kutai Kartanegara yang berafiliasi dengan Partai Golongan Karya menjabat dua kali periode kepemimpinan. Periode

pertama dijalani oleh Syaukani dari tahun 1999-2004 dan periode kedua di tahun 2005-2010. Namun periode kedua, Syaukani tidak mampu menyelesaikan tuntas kepemimpinannya karena tersandung kasus korupsi (Liputan6, 2016).

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang pernah mengenyam status sebagai daerah istimewa yang dahulunya bernama Daerah Istimewa Kutai. Pada saat berstatus daerah istimewa, kepemimpinan daerah ini berada di tangan sultan. Sultan yang memimpin adalah keturunan langsung dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Aji Muhammad Parikesit adalah sultan terakhir yang memimpin sebagai kepala Daerah Istimewa Kutai. Sepanjang tahun 1950-an, eksistensi kekuasaan di tangan keturunan kesultanan berusaha diruntuhkan. Ini terjadi karena dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan. Enam tahun setelah Undang-Undang Darurat ini di keluarkan maka hadirilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut kekuasaan Sultan Aji Muhammad Parikesit harus berakhir pula (Kutaikartanegara.com, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Atribut-atribut awal etnisitas menjadi hal utama dalam melihat politik identitas. Identitas terbentuk dari proses kombinasi antara proses dialog dalam diri dan juga di luar diri individu (interaksi sosial). Castells mengatakan bahwa politik identitas merupakan sebuah proses kontruksi (pembentukan) yang bersumber dari budaya maupun psikokultural. Pembentukan itu dibentuk oleh individu yang mana setiap individu memberikan makna dan tujuan dari individu tersebut. Sehingga terbentuknya identitas karena proses dialog internal dan interaksi sosial. Maka politik identitas versi Castells berpatokan kepada keikutsertaan individu dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya dan psikologis individu tersebut (Castells, 2010: 7). Lain halnya dengan Castells, Kritianus berargumen bahwa politik identitas ini lebih kepada kompetisi yang didasarkan kepada identitas primordial seperti etnis, ras, gender hingga agama. Maka politik identitas lebih mengutamakan kepentingan dari anggota-anggota kelompok.

Dalam tulisan Heyes, politik identitas meliputi pembahasan mengenai gender, ras, etnis, dan multikulturalisme (Heyes, 2018). Tulisan Jelly (2012) yang merupakan tulisan mengenai gender (laki-laki) di wilayah yang menganut sistem matrilineal. Konsep *Palang Pintu* yang digunakan laki-laki Minangkabau merupakan proses menguatkan posisi laki-laki yang lemah dalam status sosial di lingkungan matrilineal (Jelly dkk, 2019: 251-268). Tulisan yang ditulis dalam tajuk *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal* memberikan empat gambaran bagaimana aktor memainkan identitas berdasarkan etnis. Permainan pertama aktor memainkan etnis sebagai bahan dalam memperjuangkan pemekaran wilayah. Kedua adalah membentuk entitas politik guna penguasaan pemerintahan daerah hingga adanya pergantian rezim. Permainan ketiga permainan politik identitas di ranah lokal adalah sebagai pembeda antara satu

dengan lainnya. Tujuannya adalah bagaimana identitas pendatang dapat dipukul mundur ketika adanya kontestasi politik. Kemudian yang keempat adalah identitas digunakan untuk menggerakkan simpati pemerintah di tingkat yang lebih tinggi (Haboddin, 2012: 118).

Sri Astuti Buchari mengatakan bahwa politik identitas secara teoritis berada di setiap etnis apapun dan bersifat hidup. Keberadaan identitasnya ini dapat hadir sebagai sebuah *power* dalam politik yang mampu mendominasi karena sifatnya yang terselubung (*laten*) dan mampu muncul kapanpun saat dibutuhkan. Secara empiris ditambahkan bahwa politik identitas merupakan bentuk nyata dari keikutsertaan dalam politik yang terbentuk dari kultur lokal masyarakat. Kemudian dengan adanya ikatan antara aksi dan reaksi sosial, maka terjadilah proses penyerapan (internalisasi) yang berkelanjutan di dalam masyarakat (Buchari, 2014: 19). Sehingga dapat dilihat bahwa politik identitas merupakan sebuah instrumen dalam pertarungan politik dengan tujuan merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Contohnya dapat dilihat dari tulisan Nasrudin & Nurdin (2018) yang menggambarkan bagaimana isu identitas berupa agama dan etnis mampu mempengaruhi demokratisasi di pilkada DKI Jakarta (Nasrudin & Nurdin, 2018: 34-47).

Kajian sebelumnya mengenai Kesultanan Kutai Kartanegara terdapat dalam Tesis yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Waris Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura*. Kajian ini adalah kajian hukum tentang pembagian waris Islam di lingkungan kesultanan. Hasil dari temuan penelitian ini adalah bahwa pembagian penyelesaian warisan mengutamakan musyawarah dan tingkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris secara Islam maupun hukum pemerintahan, pendidikan dan adat (Pribadi & Anshori, 2014). Lain halnya tulisan yang berjudul *Gelar Kebangsawanan Kesultanan Kutai Kartanegara Sebagai Status Sosial* merupakan kajian ilmu psikologi yang membahas hubungan gelar bangsawan Kesultanan Kutai Kartanegara dalam membentuk status sosial dan penghargaan dalam masyarakat modern (Sofia dkk, 2017: 1-8).

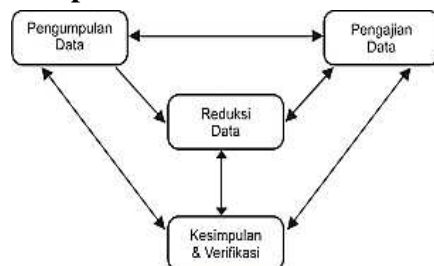
Dari *literature review* yang telah dilakukan di atas, maka kajian identitas melihat bagaimana isu identitas dijadikan alat oleh aktor tertentu dalam menjalankan kepentingannya. Apabila dilihat aktor yang berperan adalah masyarakat yang belum mempunyai kekuasaan di institusi formal. Pembeda di tulisan ini adalah pertama aktor telah berada di posisi lembaga formal negara dan mempunyai kekuasaan. Kedua, kajian mengenai kesultanan selama ini belum ada yang membahas dalam kajian ilmu politik dan penulis mengisi celah kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tulisan mengenai efek domino yang terjadi akibat dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif ini mampu menjelaskan secara komprehensif kejadian demi kejadian pasca Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dibentuk kembali. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan *Library Research*. Metode ini diperoleh dari sumber buku, jurnal, media massa *online* dan web resmi beberapa instansi terkait. Dalam melakukan *sampling*, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini dioperasikan dengan

memperoleh informasi dari satu sumber kemudian mencari sumber lainnya yang disampaikan dari sumber pertama (Salim, 2006: 13). Teknik ini membantu dalam melacak informasi yang cukup kompleks antara satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya untuk melihat efek domino yang dihasilkan akibat dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, maka dalam analisis data penulis menggunakan analisis data model interaktif. Analisis data interaktif ini dapat dipahami pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: (Miles & Huberman, 1992, p. 20)

Castells mengatakan bahwa ada tiga hal dalam pembentukan identitas yaitu identitas proyek, resisten dan legitimasi. Pertama *identitas proyek* yaitu keadaan dimana para aktor menciptakan sebuah identitas baru. Pembentukan identitas baru ini juga bersamaan dengan penentuan posisi baru para aktor juga. Disamping itu identitas proyek juga memutasi ataupun modifikasi struktur masyarakat secara keseluruhan. Identitas kedua yaitu identitas resisten yang terbentuk dari adanya suatu kondisi tertekan yang dipengaruhi oleh dominasi dan juga klise dari pihak luar. Dengan kondisi ini tercipta identitas yang baru dan berbeda dari sebelumnya guna keberlangsungan hidup individu ataupun kelompok. Ketiga *identitas legitimasi* yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah lembaga yang berpengaruh kuat dalam suatu komunitas masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial (Castells, 2010: 8). Dalam tulisan ini, bentuk identitas legitimasi-lah yang dibahas dalam kasus dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan *Pendekatan Instrumentalisme* yang mana pendekatan ini dikonstruksikan untuk kepentingan aktor tertentu, dan cenderung berfokus kepada aspek kekuasaan. Dalam tulisan ini, politik identitas tidak lepas dari apa yang dilakukan ketika identitas tersebut telah terbentuk. Apa hanya cukup ketika pengakuan itu didapat atau akan berlanjut kepada hal lainnya. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersifat tetap karena dinamika dalam hubungan antar identitas serta berkembangnya produk wacana politik dari elit yang berkuasa (Widiyanti, 2009: 15). Instrumentalisme cenderung berfokus pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa. Singkatnya adalah bahwa identitas merupakan ciptaan atau sebagai sebuah hasil dari wacana politik dari elit yang mempunyai kekuasaan (Kinasih, 2007: 17).

Teori yang membantu dalam penelitian ini diambil dari gagasan Machiavelli tentang kekuasaan (philosophybasics, 2020) dan Teori Domino. Teori kekuasaan ini digunakan untuk melihat peristiwa dibangkitkannya kesultanan, sedangkan teori domino adalah keadaan setelah kesultanan dibangkitkan. Dalam *"The Prince"* Machiavelli menekankan bahwa kekuasaan dapat dicapai dengan cara apapun baik dengan cara mulia maupun cara hina (kekerasan) demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehingga Machiavelli mengajarkan kepada sang penguasa (rezim pemerintahan) untuk dapat memanfaatkan otoritasnya dan fasilitas yang mereka miliki bagi tercapainya keinginan untuk berkuasa atau kedaulatan dan semua hal itu harus dimuliakan (Machiavelli, 1987: 38-39).

Para ahli strategi internasional telah lama memperkenalkan efek domino untuk menjelaskan hubungan suatu ideologi dan pengaruhnya, suatu agama, budaya, kebijakan politik dan moneter maupun hubungan antara suatu peristiwa politik melihat peristiwa politik lainnya. Hal ini diibaratkan ketika suatu bangun domino jatuh maka akan menjatuhkan domino lainnya secara sengaja atau memang keadaan domino lainnya lemah sehingga dapat menjatuhkan domino lainnya (Irenewati & Aman, 2014: 77-84). Semua ini berada dalam suatu garis lurus. Mempunyai kontribusi masing-masing sehingga mereka bersentuhan. Seperti inilah efek domino yang terjadi yang selalu berada dalam suatu rute (Bert, 1986: 219-224). W. J. Stronge dan D. Shu juga menjelaskan bahwa efek domino juga melihat fenomena yang berbeda. Tidak harus fenomena yang sama yang saling berjatuhan namun hal lain (di luar) juga dapat terkena imbasnya akibat fenomena yang pertama. Terjadinya efek domino ini dimulai dari sebuah fenomena awal yang cenderung bergesekan dengan hal lain. Ketika fenomena pertama mengenai hal kedua maka yang kedua menjadi ikut dalam lintasan yang pertama. Begitu selanjutnya hingga selesai. Peristiwa satu yang lainnya tidak ada hubungan pada awalnya namun terkena imbas oleh satu sama lain dan semua itu berada dalam satu alur yang sama (Stronge & Shu, 1988: 155-163).

PEMBAHASAN

Dinamika Status Daerah Kutai

Argumen utama dalam bagian ini adalah status daerah di wilayah Kutai berubah seiring waktu dan kondisi perpolitikan saat itu. Dengan adanya perubahan status wilayah dari masa ke masa maka dapat dilihat bagaimana pembangkitan identitas yang dimaksud dalam tulisan ini. Secara singkat Kesultanan Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang berasal dari Kerajaan Kutai berdasarkan bukti penemuan 7 (tujuh) buah prasasti. Prasasti diperkirakan sekitar abad ke-5 Masehi yang merupakan bukti otentik yang ditulis di atas *Yupa* (tugu batu) dengan menggunakan bahasa sansekerta dengan huruf *palawa* sebagai ejaannya (Kutaikartanegara.com, 2020).

Prasasti *Yupa* menjelaskan bahwa adanya kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang merupakan putera dari Raja Aswawarman dan juga cucu Maharaja Kudungga yang dikenal dengan nama Mulawarman. Pusat pemerintahannya kala itu berada di daerah Muara Kaman. Dilain hal, pada abad ke-13, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini berlokasi di

Tepian Batu (Kutai Lama) yang dipimpin oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Sehingga dapat diketahui bahwa adanya dua kerajaan besar di kawasan Sungai Mahakam (KutaiKartanegara.com, 2020).

Dua kerajaan besar ini saling ingin menguasai dan menaklukkan sehingga akhirnya pergesekan tidak dapat dihindarkan. Hingga pada abad ke-16 terjadilah peperangan dimana Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah rajanya *Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa* berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura (Kerajaan Kutai) dan mengganti nama kerajaanya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Istilah penyebutan raja diganti setelah kerajaan yang dulunya menganut Hindu berganti dengan sebutan sultan ketika agama Islam mendapat penerimaan yang baik oleh kerajaan ini. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan *Aji Muhammad Idris* (1735-1778) yang memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura (KutaiKartanegara.com, 2020).

Kesultanan mengalami peristiwa penggantian sultan dari masa ke masa dengan melewati peristiwa *heroik*. Dari mulai perebutan kekuasaan dan perlawanan terhadap penjajah yang datang, hingga akhirnya di tahun 1936, sultan saat itu Sultan *Aji Muhammad Parikesit* mendirikan istana yang kokoh untuk menunjukkan eksistensinya. Dua tahun setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Kutai Kartanegara ini mendapatkan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur (di dalamnya juga ada Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir). Semua kesultanan ini bergabung dalam Republik Indonesia Serikat di tahun 1949 setelah membentuk Dewan Kesultanan terlebih dahulu (KutaiKartanegara.com, 2020).

Status Daerah Swapraja bertahan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 dan berganti menjadi Daerah Istimewa Kutai. Enam tahun kemudian Daerah Istimewa Kutai pecah menjadi Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Hal ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang "Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan". Gubernur Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto atas nama Menteri Dalam Negeri melantik dan mengangkat sumpah tiga kepala daerah swatantra tersebut yang mana *Aji Raden Padmo* sebagai Bupati Kabupaten Kutai. Sehari setelah pelantikan tersebut, 21 Januari 1960, Sultan *Aji Muhammad Parikesit* menyerahkan pemerintahan kepada A.R. Padmo selaku Bupati Kutai Kartanegara setelah diadakan sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Sejak itu kesultanan tidak lagi mempunyai jabatan politik di daerah dan sultan hidup sebagai rakyat biasa (KutaiKartanegara.com, 2020).

Kembalinya Identitas: Bangkitnya Kesultanan Kutai Kartanegara

Bangkit atau munculnya politik identitas diberbagai daerah dipicu oleh adanya demokratisasi dan desentralisasi dalam konteks implementasi otonomi daerah yang nyata. Namun pada dasarnya hal kebangkitan politik identitas ini hanyalah menunggu momentum saja. Momentum tersebut berupa reformasi, demokrasi dan otonomi (Buchari, 2014: 26). Demokrasi dan otonomi tersebut memberikan nuansa baru dalam paradigma penyelenggaraan pembangunan politik.

Runtuhnya rezim Soeharto tahun 1999 merupakan titik balik beberapa adat untuk kembali bangkit. Bagi kalangan optimis kembalinya adat ini merupakan reformasi negara yang dahulunya otoritarian menuju demokrasi yang lebih bermakna. Dimana desentralisasi dengan komitmen lokal untuk menegakkan HAM akan menjadi kunci keberhasilan *civil society*. Namun bagi kalangan pesimis melihat bahwa ini akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi. Namun pengamat melihat bahwa ini merupakan penemuan kembali sumber tata tertib dan identitas masa silam dalam bentuk kampung, suku dan kesultanan (Davidson dkk, 2010: 167).

Kebangkitan kesultanan juga dialami oleh Kutai Kartanegara. Dahulunya kesultanan ini divakumkan sejak tahun 1959. Vakumnya kesultanan ini akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Undang-Undang ini berkaitan dengan pembentukan daerah tingkat II di Pulau Kalimantan. Pada tahun 1999 Syaukani, Bupati Kutai Kartanegara saat itu, bermaksud mengkatifkan kembali kesultanan tersebut. Penghidupan kembali kesultanan ini mempunyai tujuan untuk menjaga sejarah dan budaya Kerajaan Kutai sebagai identitas kerajaan pertama di Nusantara agar tidak dilupakan atau hilang oleh perkembangan zaman. Dampak lain apabila kesultanan ini dihidupkan adalah guna mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam meningkatkan kunjungan turis dalam maupun luar negeri.

Penghidupan kembali kesultanan ini mendapat "lampu hijau" oleh presiden Indonesia saat itu. Pada tanggal 07 November 2000, Syaukani dan H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat yang merupakan Putera Mahkota Kutai menghadap Abdurrahman Wahid selaku Presiden Indonesia di Bina Graha Jakarta. Akhirnya di tanggal 22 September 2001 Kesultanan Kutai Kartanegara mempunyai sultan baru. Sultan baru tersebut adalah H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat yang dulunya berstatus sebagai seorang putra mahkota. Sultan baru yang diangkat ini kemudian diberi nama (gelar adat) yaitu Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II.

Dengan adanya sultan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berinisiatif membangunkan istana baru untuk sultan sekarang. Istana yang dibangun tersebut diberi nama Kedaton Koetai Kartanegara. Pembangunan kedaton ini mengikuti konsep pembangunan istana seperti pemerintah Sultan Alimuddin (KutaiKartanegara.com, 2020). Dengan resminya berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara dan didirikan pula kedaton sebagai bukti fisik berdirinya, maka eksistensi kesultanan ini kembali hadir di Kutai Kartanegara.

Dari Identitas ke Politik Elektoral

Pasca otonomi daerah semakin meluas, *euforia* kedaerahan juga ikut menguat. Penguatan terjadi dalam hal identitas dalam kelompok, terutama kelompok asli daerah. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, wacana etnis menjadi hal pokok yang mesti diperhatikan. Hal ini terjadi karena pemilihan kepala daerah yang cenderung lebih bersifat lokal dan keberadaan etnis tertentu masih sangat berpengaruh di daerah-daerah tertentu.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang mengenai otonomi daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Di tahun 2005, Undang-Undang tersebut dijalankan pertama kali oleh Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memilih

bupati dan wakil bupati. Pengalaman pertama pemilihan langsung di Indonesia ini mendapat sorotan khusus baik dalam maupun luar negeri (Merdeka.com, 2020). Pilkada tahun 2005 di Kutai Kartanegara ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu H.M. Tajuddin Noor, S.Sos dan Drs. H. Abdul Djebar Bukran, Drs.H. Syaukani HR, MM dan Drs.H. Samsuri Aspar, MM serta pasangan ketiga adalah H. Aji Sofyan Alex, B.Sc dan Drs. H. M. Irkham.

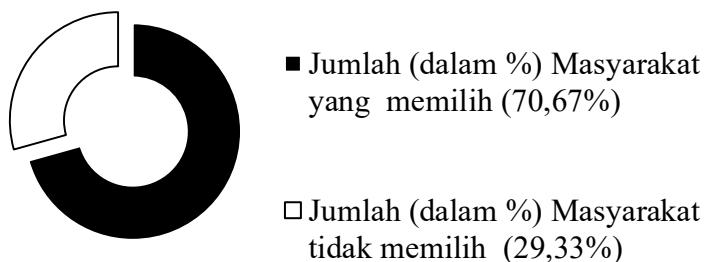
Syaukani maju kedua kalinya sebagai calon kepala daerah Kutai Kartanegara. Syaukani dipandang baik oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Kepopulerannya dikarenakan oleh sifatnya yang elegan flamboyan namun merakyat. Syaukani juga dipandang sebagai tokoh yang peduli dengan budaya masyarakat Kutai yaitu *Erau* meskipun dia bukanlah orang asli daerah tersebut. Namun Syaukani diuntungkan oleh istrinya yang merupakan bangsawan Kutai sehingga mendapat dukungan dari beberapa golongan masyarakat dari level *grass root* hingga ke level tokoh masyarakat, agama dan beragama kelompok etnis. Dengan jasanya yang besar kepada pihak kesultanan, Syaukani tentunya menginginkan dukungan dari pihak kesultanan. Namun keinginan itu tidak terwujud. Lawan terberat Syaukani adalah Aji Sofyan Alex yang merupakan bangsawan Kutai (*Aji* merupakan gelar bangsawan dari Kutai yang hanya dapat digunakan bagi keturunan bangsawan langsung). Pencalonan Aji Sofyan Alex sangat disambut baik oleh kalangan kesultanan. Pencalonan ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan kesultanan di perpolitikan Kutai Kartanegara. Sehingga pencalonan Aji Sofyan Alex ini mendapat dukungan dari kesultanan dan bangsawan Kutai lainnya.

Majunya kedua calon ini menjadi posisi dilematis bagi Kesultanan Kutai Kartanegara. Di lain sisi Syaukani telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan budaya Kutai dan pelestarian budaya tersebut dalam kemeriahan *Erau* setiap tahunnya. Selain itu Syaukani telah menyiapkan anggaran khusus untuk keperluan kerabat keraton dan membangunkan kedaton pasca secara resmi diterimanya Kesultanan Kutai Kartanegara untuk bangkit kembali. Namun hal ini tidak menjamin pihak kesultanan akan mendukung Syaukani dalam pencalonan sebagai bupati Kutai Kartanegara. Pihak kesultanan memilih untuk mendukung Aji Sofyan Alex sebagai bupati karena faktor keturunan bangsawan Kutai tadi. Dukungan ini akan menjadi langkah awal mengembalikan otoritas kesultanan dalam perpolitikan yang telah hilang dalam diri bangsawan di Kutai Kartanegara. Keberpihakan kesultanan ini dipengaruhi karena keyakinan bangsawan keraton akan legitimasi sultan masih kuat dan berpengaruh serta mampu mewujudkan kepentingan masyarakat. Sehingga nantinya pihak keraton menang dalam kontestasi ini maka kepentingan Kesultanan Kutai Kartanegara akan menjadi prioritas.

Setelah melalui tahap-tahap pemilihan maka akhirnya Syaukani dan Samsuri Aspar ditetapkan sebagai pemenang dengan hasil 60,85%. Berikut hasil dari pemilihan tersebut yang diilustrasikan dalam bentuk grafik.

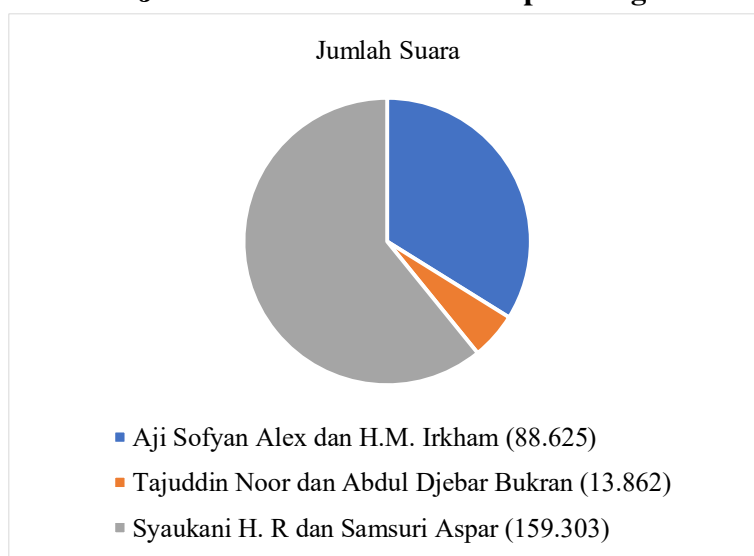
Grafik 2. Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara 2005

Jumlah Pemilih Tetap Dalam Daftar (375.925)



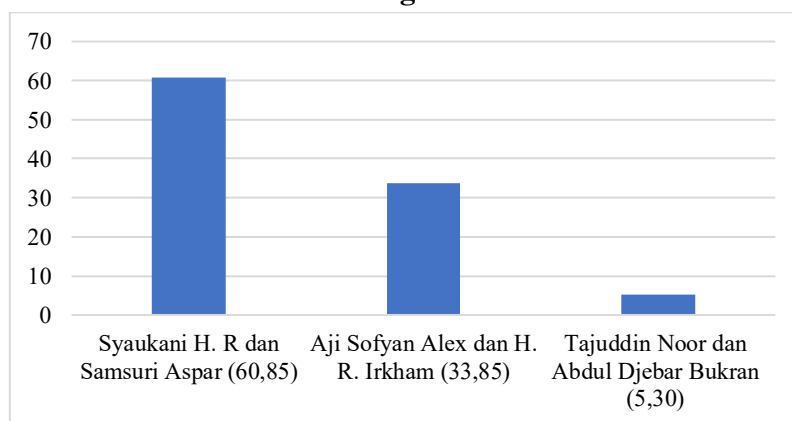
Sumber: <https://www.kutaikartanegara.com/pilkada2005.php>

Grafik 3. Jumlah Pemilih dalam Setiap Pasangan Calon



Sumber: <https://www.kutaikartanegara.com/pilkada2005.php>

Grafik 4. Persentase Perolehan Suara Pemilihan Kepala daerah Kab. Kutai Kartanegara 2005



Sumber: <https://www.kutaikartanegara.com/pilkada2005.php>

Dari Politik Elektoral ke Politik Anggaran

a. Arti Pentingnya Festival Erau

Argumen dari sub bab ini adalah perubahan status kesultanan dari masa ke masa juga berdampak kepada perubahan fungsi pelaksanaan *Erau*. Perubahan Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi Kabupaten Kutai hingga Kabupaten Kutai Kartanegara mengubah juga *Erau* yang dulunya dilaksanakan sebagai upacara pengangkatan raja/sultan baru menjadi sebatas ritual pelestarian budaya dan ritual politik yang terkait dengan relasi kuasa.

Di Kesultanan Kutai Kartanegara apabila adanya penggantian kekuasaan di laksanakan upacara dan pesta besar yang dikenal dengan sebutan *Erau*. Dalam Bahasa Kutai, *Erau* yaitu “*eroh*” yang memiliki arti suasana ramai, riuh dengan penuh rasa suka cita. *Erau* adalah sebuah kegiatan yang bersifat keramat, sebuah seremoni hingga bersifat sebagai pertunjukan seni budaya. Sejarah menyebutkan bahwa pelaksanaan *Erau* dilakukan pertama kali saat *Aji Batara Agung Dewa Sakti* menginjak usia 5 tahun. *Erau* dilaksanakan dalam upacara tajak tanah dan mandi ke tepian. Kedua kalinya *Erau* dilaksanakan ketika *Aji Batara Agung Dewa Sakti* menginjak usia dewasa. Upacara *Erau* kedua kali ini dilaksanakan guna mengangkat *Aji Batara Agung Dewa Sakti* menjadi raja Kutai Kartanegara pertama di tahun 1300-1325. Hingga akhirnya *Erau* dihentikan akibat berubahnya status kesultanan. Pelaksanaan *Erau* terakhir sebelum divakumkannya kesultanan adalah saat pengangkatan putra mahkota di tahun 1965. Putra mahkota yang diangkat yaitu *Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat*. Namun di tahun 1971 atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Kutai, *Erau* secara rutin dilaksanakan kembali dalam waktu dua tahun sekali. Pelaksanaan *Erau* pada saat itu di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Dahlan yang dilaksanakan bersamaan dengan hari jadi Tenggarong. Pelaksanaan *Erau* dilakukan atas kolaborasi antara kesultanan dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kutaikartanegara.com, 2020).

Momentum pengangkatan *Aji Batara Agung Dewa Sakti* sebagai raja pertama Kutai Kartanegara ini menjadikan *Erau* acara wajib dalam pergantian kekuasaan dan penobatan raja berikutnya. *Erau* dalam perkembangannya selain dilaksanakan dalam pengangkatan raja Kutai juga dilaksanakan untuk pemberian gelar kepada pemuka masyarakat yang telah berkontribusi kepada kesultanan oleh sultan. Kesultanan pada saat dilaksanakan *Erau* juga menyambut masyarakat dan memberikan pelayanan. Kegiatan ini merupakan bentuk terima kasih sultan terhadap masyarakat atas pengabdian terhadap kerajaan (Kutaikartanegara.com, 2020).

Erau merupakan acara yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Ketika kekuasaan sultan Kutai berakhir di bidang politik, maka pelaksanaan *Erau* berubah fungsinya. *Erau* dilaksanakan kembali guna pelestarian dan memelihara tradisi dan budaya yang dikemas dalam festival pesta rakyat. Selain itu, setelah *Erau* tidak dilaksanakan atas dasar pengangkatan sultan baru, maka *Erau* beralih fungsi ke ritual politik terkait relasi kuasa (Sani, 2012: 299). Adapun fungsi *Erau* adalah sebagai fungsi sosial, spiritual dan fungsi pariwisata. *Erau* berfungsi sebagai fungsi sosial seperti pengawasan sosial, aksi dan reaksi antar aktor, dan komunikasi diantara masyarakat. Sehingga berdampak positif terhadap persatuan diantara masyarakat. Fungsi kedua *Erau* adalah fungsi spiritual. Fungsi spiritual ini mengenai penyembahan terhadap roh, leluhur nenek moyang atau tuhan yang diyakini. Hal ini

berguna untuk pelaksanaan nilai keagamaan sehingga nantinya diperoleh rasa aman, sejahtera, damai dan kebahagiaan lahir bathin. *Ketiga* fungsi pariwisata baik bagi warga lokal maupun luar Kutai Kartanegara (Sani, 2012: 299).

b. Gagalnya Festival Erau Sebagai Konsekuensi Ketidakberpihakan Kesultanan Kepada Syaukani Hasan Rais

Pesta demokrasi telah selesai dan membawa dampak terhadap kesultanan. Kekalahan calon yang didukung oleh pihak kesultanan ini dikarenakan masyarakat sipil telah mengalami penguatan. Ditambah dengan kekhawatiran masyarakat kebangkitan pemerintahan oleh sultan atau penguasaan oleh kaum bangsawan. Masyarakat juga mengkhawatirkan terulang lagi masa lalu ketika masyarakat mendambakan kebebasan dan kemerdekaan dari penjajah. Ketakutan masyarakat terkait pemerintahan *swapraja* (kesultanan) yang melakukan kerjasama dengan NICA dan hidup dalam kemewahan (Sani, 2012: 306).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjadi salah satu *euforia* otonomi daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pendapatan asli daerah yang besar dari batubara maupun minyak bumi dan gas alam, tentunya memiliki kemampuan untuk melaksanakan *Erau* dengan sangat meriah. Dalam pelaksanaan *Erau* pasca otonomi ini, peran kesultanan sangat terbatas karena penyandang dana utama adalah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga Syaukani pada saat itu menjadi aktor utama dalam menentukan pelaksanaan atau tidak Festival *Erau*.

Keberhasilan Syaukani memenangkan hasil pilkada berpengaruh kepada pelaksanaan *Erau*. Kemenangan Syaukani menentukan kebijakan pembangunan dan tentunya juga pelaksanaan *Erau* di Kutai Kartanegara berikutnya. Pasca kemenangan Syaukani sebagai kepala daerah pertama yang dipilih secara langsung di Indonesia terbesit kekecewaan terhadap pihak kesultanan. Sehingga Syaukani yang mempunyai otoritas akan pelaksanaan *Erau* atau tidak mengambil sikap. Kekecewaan itu berdampak kepada gagalannya pelaksanaan *Erau* 2004-2006. Pemerintah yang menjadi penyandang dana tidak bersedia melaksanakan *Erau*. Sedangkan kesultanan yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan itu juga tidak mampu melaksanakannya karena besarnya dana yang dibutuhkan (Sani, 2012: 307).

Di penghujung 2006, Syaukani kembali membangkitkan penyelenggaraan *Erau* yang terhenti beberapa tahun. Syaukani tidak mau berlarut dengan kekecewaan terhadap pihak kesultanan yang tidak mendukung pencalonnya menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Kebekuan hubungan antara pemerintah yang dipimpin oleh Syaukani dengan pihak kesultanan dibantu oleh aktor *intermediary* yang bernama Sempekat Keroan Kutai. Organisasi ini berkonsentrasi untuk kemajuan budaya Kutai yang bersifat inklusif dan akomodatif.

Sempekat Keroan Kutai ini direstui dan diresmikan oleh Sultan Kutai Kartanegara, H. Aji Mohammad Salehuddin II. Organisasi ini juga mendukung program pemerintah dalam menciptakan masyarakat madani yang multi kulturalistis. Maka Syaukani melihat kembali bahwa *Erau* juga akan mampu mengembangkan wisata daerah. Akhirnya *Erau* kembali dilaksanakan di tahun 2007 dan mengikhlaskan peristiwa saat pemilihan kepala daerah tahun 2005 di Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN

Dari paparan dibangkitkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara, maka mempunyai efek domino setelahnya. Efek domino tersebut dimulai dari politik identitas, membawa ke politik elektoral dan berakhir di politik anggaran. Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara ini memperlihatkan bahwa rezim menjadikan kesultanan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan kembali. Ketika alat politik tersebut tidak bekerja sesuai rencana, maka rezim menunjukkan kekuatan dan kekuasaan terhadap kesultanan.

Awal dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara adalah bertujuan untuk pelestarian budaya dan berdampak kepada pariwisata. Namun ada alasan lainnya yang hendak dicapai oleh rezim Syaukani yaitu kesultanan dijadikan alat untuk mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah di Kutai Kartanegara. Namun di sisi pihak kesultanan, bangkitnya kesultanan merupakan momentum untuk mengembalikan kejayaan kesultanan pada masa lalu. Kebangkitan ini juga menentukan arah politik kesultanan yang mendukung pasangan calon bupati yang berasal dari keturunan bangsawan Kutai.

Ketidakterpuhkan kesultanan terhadap Syaukani dianggap seperti sebuah pengkhianatan yang membuat Syaukani kecewa. Kekecewaan itu semakin dilihat ketika Syaukani berhasil memenangkan pilkada. Dengan kemenangan ini, Syaukani mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan apa yang hendak dibuatnya untuk lima tahun ke depan termasuk dilaksanakan atau tidak Festival *Erau*. Bermain di anggaran, membuat *Erau* hajatan tahunan kesultanan dihentikan. Pelaksanaan *Erau* yang seyogyanya dilaksanakan rutin namun tidak terlaksana dari tahun 2004-2006. Pemerintah yang memegang kendali dana tidak bersedia dalam membiayai pelaksanaan *Erau* tersebut. Pihak kesultanan juga tidak mempunyai dana yang besar dalam melaksanakan *Erau*.

Dari semua peristiwa di atas dapat dilihat bahwa kemunculan politik identitas dimaknai berbeda oleh rezim maupun identitas yang dibangkitkan. Dari pemaknaan yang berbeda itu politik identitas tidak hanya sebagai mewariskan budaya lokal namun mengarah ke politik elektoral hingga politik anggaran. Pihak pemerintah yang dipimpin Syaukani memperlihatkan fenomena pergeseran (domino) politik identitas yang dibangkitkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bert, C. W. (1986). *Falling Dominoes*. *SIAM Review*, 28(2). Hlm. 219-224
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Oxford UK : Blackwell Publishing Ltd
- Haboddin, M. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116-134
- Heyes, C. "Identity Politics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Diakses melalui <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/identity-politics/>. Diakses 16 Juni 2020

- http://erau.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Erau pada tanggal 06 Desember 2020
- <http://www.kutaiartanegara.com/pilkada2005.php> pada tanggal 06 Desember 2017
- http://www.philosophybasics.com/branch_instrumentalism.html Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- <https://www.liputan6.com/news/read/138912/kpk-segera-memanggil-saksi-kasus-korupsi-syaukani> pada tanggal 11 Juni 2020
- Irenewati, T dan Aman. (2014). Dampak Teori Domino Di Negara-Negara Afrika Utara. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19 (1), 77-84
- Jelly, Afrizal & Delfi, M. (2019). Palang Pintu: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 251-268
- Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. Diakses melalui http://kesultanan.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Keraton_Kutai 05 Desember 2020
- Kesultanan Kutai Kartanegara. *Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara* diakses melalui <http://kesultanan.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Sejarah> pada tanggal 26 November 2020
- Kinasih, A. W., (2007). *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Yogyakarta: IP Fisipol UGM
- Maarif, A. S., (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Machiavelli. (1987). *Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. Jakarta : Gramedia
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Nasrudin, J & Nurdin, A.A. (2018). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34-47
- Pilkada Langsung di Kutai Kartanegara Jadi yang Pertama. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yang-pertama-9ljvzah.html> 06 Desember 2020
- Pribadi, B.Y., dan Anshori, A.G., (2014). *Pelaksanaan Pembagian Waris Islam Di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura*. Yogyakarta: FH UGM
- Salim, A. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sani, M.Y. (2012). Erau: Ritual Politik Dan Kekuasaan. *Jurnal Al-Qalam*, 18(2), 297-309
- Sofia, L., Rosyida, A.H., Sholikhatin, N.H., Ariyanti, N. S., dan Muhliansyah. Gelar Kebangsaan Kesultanan Kutai Kartanegara Sebagai Status Sosial. *Jurnal Psikologi*, 6 (2) 2017, 1-8
- Stronge, W. J dan Shu, D. (1988). The Domino Effect: Successive Destabilization by Cooperative Neighbours. *Proceedings of the Royal Society of London*, 418(1854), 155-163

- Sudiby, A. (1998). De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru : Kilas Balik Rekayasa Praktek-Praktek Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 1-25
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
- Wafi, A.R.A. (2019). Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 21(2), 171-186